

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI REKAPITULASI  
ELEKTRONIK (Sirekap) DALAM PEMILU 2024 DI  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA**

**Muhammad Nur Rahim, Saipul**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 13, Nomor 2, 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam Pemilu 2024 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

Pengarang : Muhammad Nur Rahim

NIM : 2102016048

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 15 Mei 2025

**Pembimbing,**



**Dr. Saipul, M.Si.**

**NIP. 19760907 200312 1 001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	<b>: eJournal Administrasi Publik</b>
----------------------	---------------------------------------

<b>Volume</b>	<b>: 13</b>
---------------	-------------

<b>Nomor</b>	<b>: 2</b>
--------------	------------

<b>Tahun</b>	<b>: 2025</b>
--------------	---------------

<b>Halaman</b>	<b>: 339-348</b>
----------------	------------------

# IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK (Sirekap) DALAM PEMILU 2024 DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA

Muhammad Nur Rahim <sup>1</sup>, Saipul <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas penerapan Sirekap dalam mendukung proses rekapitulasi suara pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasinya di lingkungan PPK Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan petugas PPK dan stakeholder terkait, serta studi dokumentasi dari sumber resmi KPU. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang mengintegrasikan aspek teknis, operasional, dan manajerial dalam implementasi sistem informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sirekap telah berkontribusi pada peningkatan transparansi dan kecepatan proses rekapitulasi suara, meskipun masih terdapat kendala pada infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan pelatihan dan dukungan teknis untuk mengoptimalkan penggunaan Sirekap dalam proses pemilu.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Sirekap, Pemilu 2024, Rekapitulasi Suara, Teknologi Informasi, Transparansi, Kendala Operasional*

## **Pendahuluan**

Demokrasi menempatkan kedaulatan tertinggi pada rakyat yang menyalurkannya lewat Pemilu, di mana KPU, Bawaslu, dan DKPP bertanggung jawab menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakkan etika pemilihan (Novitasari, 2024). Pada Pemilu 2024, KPU mengimplementasikan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk mempercepat dan menambah transparansi rekap suara dari TPS hingga pusat (KPU, 2023). Namun, Sirekap menghadapi kendala serius: kesalahan input data yang “menggelembungkan” suara (Sutadi, 2024), keterbatasan perangkat dan pelatihan KPPS di lapangan (Asy’ari, 2024), kualitas foto Formulir C1 yang beragam akibat kamera ponsel (Katadata.co.id, 2024), dan akurasi OCR yang hanya 92–93%, menimbulkan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [rahimrpd@gmail.com](mailto:rahimrpd@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

selisih dengan formulir asli (Kisworo, 2024). Di Kecamatan Loa Janan Ilir, hanya 24 dari 53 TPS di Rapak Dalam berhasil menampilkan data hingga akhir hari, akibat gangguan jaringan, bug sistem, dan kurangnya pelatihan operator; sebagai solusi darurat, operator memotret Form C1 dan mengirimnya via WhatsApp untuk sidang pleno kecamatan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Sirekap di PPK Loa Janan Ilir serta mengidentifikasi faktor penghambat teknis, sumber daya manusia, dan infrastruktur untuk merumuskan rekomendasi peningkatan efektivitas sistem informasi publik Pemilu.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan dan tindakan pemerintah atau aktor publik untuk menyelesaikan masalah sosial dan mewujudkan nilai bersama melalui pedoman tertulis berkekuatan hukum yang proaktif, adaptif, dan terbuka bagi konteks lokal (Anderson, 1979; Dun, 1999). Ia memuat aspirasi, tujuan, dan prinsip perencanaan (Marbun, 2007) serta mencakup apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah (Dye, 1978). Berdasarkan strukturnya, kebijakan publik terbagi menjadi tiga strata kebijakan umum (undang-undang, peraturan daerah), kebijakan pelaksanaan (peraturan pemerintah/menteri), dan kebijakan teknis operasional yang bersama-sama menjamin implementasi sesuai sasaran (Abidin, 2006). Ciri utamanya adalah orientasi pada tujuan, rangkaian tindakan terhubung, realisasi tindakan pemerintah, sifat positif/negatif, dan landasan hukum memaksa (Abidin, 2006). Instrumennya undang-undang, regulasi, maklumat dilengkapi sanksi reward dan punishment untuk memastikan kepatuhan (Fischer et al., 2007), dengan tujuan mencapai keadilan, kesetaraan, transparansi, penyelesaian masalah sosial, pemanfaatan peluang baru, dan perlindungan masyarakat (Nugroho, 2009). Dalam perspektif Machiavelli, kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan kekuasaan secara efektif dengan memahami dinamika politik, sehingga keberhasilannya diukur dari kinerja implementasi, bukan semata-mata kebenaran teoritisnya (Parsons, 2005).

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Implementasi kebijakan publik adalah proses dinamis yang mengubah keputusan resmi menjadi tindakan nyata dengan melibatkan interaksi birokrasi, aktor politik, ekonomi, dan sosial. Grindle menekankan dua variabel utama “content” (isi program, seperti jenis manfaat dan sumber daya) dan “context” (konteks politik dan institusi) yang bersama-sama menentukan probabilitas keberhasilan implementasi. Mazmanian & Sabatier menyoroti tiga kelompok variabel bebas (kendali atas masalah, koordinasi, dan pengaruh politik) yang memengaruhi tahapan output dan dampak kebijakan. Van Meter & Van Horn menggambarkan implementasi sebagai rangkaian tahapan mulai dari perumusan kebijakan, alokasi sumber daya, komunikasi efektif, disposisi pelaksana, hingga kondisi eksternal ekonomi, sosial, dan politik yang saling memengaruhi kinerja

kebijakan. Sementara itu, Edward III menegaskan empat komponen krusial komunikasi, sumber daya manusia, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai fondasi untuk mencegah fragmentasi aksi dan memastikan efektivitas implementasi. Dengan mengintegrasikan kerangka-kerangka ini, analisis implementasi Sirekap di PPK Loa Janan Ilir dapat memetakan variabel “isi” dan “konteks” yang paling determinan bagi keberhasilan program.

### ***Konsep Demokrasi***

Demokrasi dari kata Yunani “demos” (rakyat) dan “kratos” (kekuasaan) menempatkan kedaulatan tertinggi pada rakyat yang memilih wakilnya untuk mewujudkan pemerintahan bagi, oleh, dan dari rakyat. Di Indonesia, Demokrasi Pancasila menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sejak ekklesia Athena abad ke-5 SM, prinsip kedaulatan rakyat, persamaan hak, pemilu bebas dan adil, serta akuntabilitas pemerintah menjadi fondasi global. Partisipasi warga dapat berupa demokrasi langsung (forum umum) atau perwakilan (melalui wakil terpilih), bahkan dikombinasikan dengan referendum untuk keputusan krusial. Secara kelembagaan, terdapat sistem parlementer hubungan erat legislatif dan eksekutif di bawah perdana Menteri serta sistem pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terakhir, demokrasi formal menitikberatkan kesetaraan politik, demokrasi material menekankan kesetaraan ekonomi, sedangkan demokrasi gabungan menyatukan keduanya untuk mengoptimalkan manfaat sekaligus memitigasi kelemahan masing-masing model.

### ***Konsep Pemilihan Umum (Pemilu)***

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah mekanisme inti demokrasi di mana warga negara langsung memilih wakil eksekutif dan legislatif serta menentukan kebijakan publik melalui suara mayoritas (Dahl, 1989; Przeworski et al., 2000). Sistem proporsional atau mayoritas sederhana memengaruhi rasio suara kursi dan stabilitas pemerintahan (Sartori, 1976), sementara tingkat partisipasi dipengaruhi faktor sosio-ekonomi dan Pendidikan menjadi tolok ukur kesehatan demokrasi (Verba, Schlozman & Brady, 1995). Transparansi dan kejujuran dalam pendaftaran, pemungutan, dan pengumuman hasil adalah prasyarat membangun kepercayaan publik (Birch, 2011), serta legitimasi politik tidak hanya bersumber dari prosedur Pemilu, tetapi juga konsistensi kebijakan pemerintah dengan aspirasi rakyat (Beetham, 1991). Di Indonesia, Pasal 22E UUD 1945 dan UU No. 7/2017 menjamin Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; sejak 2004 rakyat memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan sejak 2005 kepala daerah langsung, dengan 18 partai nasional dan 6 partai Aceh bertarung pada Pemilu 2024 sebagai cerminan arena kompetisi kekuasaan yang adaptif terhadap dinamika sosial (Schumpeter, 1942; KPU No. 552/2022).

### ***Konsep Inovasi***

Inovasi politik adalah penerapan ide, produk, atau proses baru yang membawa perubahan signifikan pada sistem pemerintahan (Rogers, 2003). Schumpeter menggambarkan fenomena ini sebagai “creative destruction”, di mana gagasan baru menggantikan model lama yang kaku demi meningkatkan legitimasi dan efisiensi kebijakan publik (Schumpeter, 1942; Walker, 1969). Era digital membuka peluang lewat e-governance dan media sosial untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Jenkins & Thorburn, 2003), sementara pendekatan new public management mencontoh praktik sektor swasta untuk mengefisienkan administrasi publik (Hood, 1991). Keberhasilan e-residency di Estonia menunjukkan potensi inovasi digital dalam layanan publik (Kalvet, 2012), namun resistensi dari birokrasi dan aktor yang nyaman dengan status quo menuntut keberanian serta dukungan kebijakan yang kuat untuk mengatasi hambatan struktural (Mulgan & Albury, 2003), menjadikan inovasi sebagai kebutuhan strategis dalam menciptakan tata kelola yang responsif terhadap tuntutan masyarakat.

### ***Konsep Teknologi***

Teknologi, sebagai penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis, memecahkan masalah dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, dengan inovasi disruptif menggantikan model lama melalui solusi lebih murah, cepat, dan mudah diakses. Revolusi Industri Keempat menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologis lewat otomasi dan kecerdasan buatan, sementara platform online dan simulasi digital memperluas akses pendidikan meski menimbulkan risiko misinformasi. Di Indonesia, teknologi elektoral meningkatkan akurasi dan transparansi Pemilu: Sidalih memutakhirkan data pemilih secara real-time, verifikasi biometrik sidik jari menjamin hanya pemilih sah yang berpartisipasi, e-voting dan e-counting diuji sebagai upaya percepatan hitung suara, dan Situng menampilkan hasil real-time untuk menurunkan spekulasi manipulasi. Keamanan siber diperkuat lewat kolaborasi dengan BSSN, sementara Sirekap mengintegrasikan unggahan Form C1 secara online dengan enkripsi dan verifikasi untuk mempercepat rekapitulasi, menjamin transparansi, efisiensi, dan integritas data Pemilu.

### ***Konsep Aplikasi***

Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan tugas pengguna, dikembangkan melalui siklus desain, pengkodean, pengujian, dan peluncuran dengan metodologi Agile agar iterasi cepat menyesuaikan umpan balik pengguna. Pada era mobile, ada tiga tipe native, web-based, hybrid dengan perbedaan performa dan kemudahan kembangan, sementara desain UI/UX yang intuitif dan responsif menjadi kunci retensi. Keamanan data sensitif mewajibkan enkripsi dan perlindungan privasi, dan dalam bisnis aplikasi ERP merampingkan proses serta mendukung keputusan berbasis data. Khusus untuk Pemilu 2024, Sirekap kolaborasi ITB-KPU sesuai Keputusan KPU No. 66/2024 tersedia di

mobile dan web untuk mengunggah foto Formulir C-Hasil, memproses OCR/OMR, dan menyebarkan data real-time kepada saksi serta pengawas . Dengan anggaran Rp 3,5 miliar, Sirekap menjanjikan efisiensi, pembaruan otomatis, dan transparansi, meski masih terkendala login, kualitas gambar, dan stabilitas aplikasi, sehingga evaluasi dan peningkatan fitur berkelanjutan sangat dibutuhkan .

### ***Definisi Konseptual***

Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) adalah proses penerapan inovasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk menggantikan sistem manual rekapitulasi suara Pemilu dan Pilkada dengan platform digital yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Implementasi ini dimulai dengan perencanaan dan persiapan meliputi pengadaan perangkat, pelatihan petugas KPPS, dan sosialisasi kepada masyarakat lalu diikuti penerapan di seluruh TPS, di mana petugas KPPS mencatat dan memotret Formulir C-Hasil melalui aplikasi Sirekap. Data suara yang terkumpul direkapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan hingga nasional dan dipublikasikan secara real-time di website KPU, memungkinkan pemantauan publik sepanjang proses. Manfaat utama implementasi Sirekap meliputi percepatan penetapan hasil, peningkatan kepercayaan publik, dan kemudahan dalam pengawasan, sedangkan tantangan utamanya berkisar pada ketersediaan infrastruktur, keterampilan petugas, dan keamanan siber yang harus diatasi agar sistem dapat berfungsi optimal.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sesuai Miles & Huberman (1994) dan Bogdan & Biklen (1992), untuk menggambarkan secara mendalam implementasi Sirekap di PPK Loa Janan Ilir dalam konteks alamnya. Fokus penelitian mencakup enam variabel model Van Meter & Van Horn standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, dan kondisi sosial-ekonomi-politik serta faktor penghambat pelaksanaan Sirekap. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tujuh informan kunci (Ketua dan anggota PPK, petugas KPPS, operator dan admin Sirekap, serta pengawas kecamatan), sementara data sekunder bersumber pada dokumen resmi PPK, laporan observasi, publikasi media, dan studi terdahulu. Teknik pengumpulan meliputi observasi langsung di TPS, wawancara mendalam, dan dokumentasi prosedur serta hasil rekapitulasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman & Saldana (2014): (1) pengumpulan data, (2) kondensasi melalui seleksi dan abstraksi temuan utama, (3) penyajian data dalam narasi terstruktur, dan (4) penarikan kesimpulan

berkelanjutan dengan menelusuri pola, keteraturan, dan hubungan sebab-akibat yang memetakan efektivitas serta hambatan implementasi Sirekap.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam Pemilu 2024 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Loa Janan Ilir***

##### **a. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Standar dan tujuan Sirekap dalam PKPU No. 25/2023 seperti batas unggah data  $\leq 15$  menit/TPS, login  $\geq 95$  %, dan selisih digital-manual  $\leq 0,1$  % belum konsisten tercapai di lapangan. Wawancara dengan Ketua PPK dan petugas KPPS mengungkap seringnya gangguan server, kesulitan login, dan perangkat tidak memadai yang memaksa kembali ke metode manual, hingga perbedaan hasil manual versus Sirekap menimbulkan kebingungan publik. Meskipun regulasi sudah jelas, bimtek yang mepet hari-H dan minimnya sarana pelatihan memperparah kendala, selaras temuan Gauru dkk. tentang infrastruktur dan kompetensi petugas sebagai hambatan utama. Untuk menutup gap ini perlu desentralisasi infrastruktur (misalnya server lokal), pelatihan berlapis plus modul video dan sertifikasi pasca-bimtek, dashboard umpan balik real-time, serta edukasi publik yang inklusif agar Sirekap tidak hanya berfungsi teknis tetapi juga mengokohkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat pada demokrasi digital.

##### **b. Sumber Daya**

Ketersediaan sumber daya baik material (perangkat Android dan jaringan) maupun non-material (pelatihan dan kapasitas SDM) terbukti krusial bagi implementasi Sirekap di PPK Loa Janan Ilir. Meski dua petugas KPPS per TPS telah direkrut adhoc, wawancara mengungkap ketergantungan pada ponsel pribadi, pembaruan aplikasi mendadak, dan gangguan server yang menghambat login serta unggah data. Disparitas infrastruktur mulai dari koneksi stabil hingga tanpa akses sama sekali memaksa kembali ke metode manual. Di sisi pelatihan, bimtek umum dan terlambat gagal membekali operator baru dengan keterampilan troubleshooting, menciptakan kapasitas teknis yang tidak merata. Untuk menutup kesenjangan ini, diperlukan pelatihan lanjutan berjenjang, penyediaan perangkat sesuai spesifikasi, dan peningkatan jaringan di semua TPS agar sinergi SDM-teknologi dapat tercapai optimal.

##### **c. Komunikasi Antar Organisasi**

Komunikasi antarorganisasi di PPK Loa Janan Ilir mengombinasikan pedoman resmi KPU dan rapat pleno dengan saluran informal WhatsApp dan Zoom 24 jam sehingga lebih dari seribu laporan kendala teknis Sirekap pada hari H dapat segera ditangani. Meski verifikasi ganda (input manual oleh PPS dan konfirmasi pleno kecamatan) menjamin akurasi, seringnya server down dan error aplikasi memunculkan kebingungan tentang penanggung jawab serta prosedur darurat. Kapabilitas SDM yang bervariasi akibat bimtek umum dan mendekati

hari H semakin membebani saluran informal yang belum terfilter (Yusrin & Salpina, 2023). Untuk itu, perlu kanal prioritas isu kritis, protokol tanggap darurat terstruktur, dan liaison officer antar-level agar respons cepat dan konsistensi informasi terjaga demi kepercayaan publik terhadap digitalisasi pemilu.

d. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana Sirekap di PPK Loa Janan Ilir menunjukkan sikap kritis terhadap kematangan teknis aplikasi sekaligus komitmen institusional untuk menjalankan tugas sesuai PKPU. Ketua PPK meski meragukan keandalan Sirekap, tetap memimpin pelaksanaan, sementara anggota seperti Alfiandy antusias mengadopsi digitalisasi meski KPPS mengalami “shock culture.” Early adopters di TPS, misalnya Ratna Sari, lancar menginput data, sedangkan operator baru di TPS 23 dan 12 mengandalkan solusi manual karena waktu terbatas dan kendala teknis. Meski perceived usefulness tinggi, low perceived ease of use dan gangguan server menuntut pelatihan berjenjang untuk menyetarakan kapasitas. Kreativitas seperti penggunaan PDF alternatif dan inisiatif “tech-buddy” memperlihatkan adaptasi operasional yang kuat, menegaskan bahwa kesuksesan Sirekap bergantung pada sinergi kesiapan teknis dan disposisi manusia yang didukung lingkungan kerja positif dan kepemimpinan responsif.

e. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Sirekap di Loa Janan Ilir mengikuti rantai komando KPU Kota → PPK → PPS → operator TPS dengan tugas dan wewenang jelas, sehingga verifikasi Form C Plano oleh PPS dan konfirmasi di pleno kecamatan berjalan sistematis. Panwascam mengawasi secara top-down untuk memastikan kesesuaian data digital dan fisik, meski pelaporan berjenjang kadang memperlambat respons teknis. Efektivitas bimtek bervariasi operator baru sering kurang percaya diri menghadapi error, dan kesalahan OCR masih memicu misinformasi meski hasil resmi tetap ditetapkan lewat pleno menunjukkan perlunya pelatihan simulasi langsung, penyederhanaan jalur pelaporan darurat, dan pusat bantuan real-time agar struktur hierarkis tidak hanya memastikan akuntabilitas, tetapi juga responsivitas dan fleksibilitas dalam transformasi digital pemilu.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial di Loa Janan Ilir menunjukkan sambutan positif masyarakat terhadap Sirekap sebagai upaya transparansi, namun kesenjangan literasi digital memicu kesalahpahaman pasca-pemilu bahwa hasil Sirekap bersifat final sehingga diperlukan sosialisasi lebih masif. Dari sisi ekonomi, efisiensi anggaran terhambat oleh infrastruktur TPS yang belum merata perangkat sering error dan koneksi internet tidak stabil menimbulkan frustrasi operator dan beban kerja manual. Secara politik, meski partai dan saksi memahami Sirekap sebagai alat bantu, selisih angka digital-manual memunculkan polemik yang mengharuskan

verifikasi dua arah di pleno untuk menjaga legitimasi, sementara sinergi pra-pemilu antara Danramil, Kapolsek, dan Camat membantu menjaga stabilitas dan menegaskan bahwa kesuksesan digitalisasi pemilu menuntut literasi sosial, investasi infrastruktur, dan mekanisme politik yang responsif.

### ***Penghambat Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam Pemilu 2024 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Loa Janan Ilir***

Berdasarkan hasil penelitian di PPK Loa Janan Ilir, ditemukan beberapa faktor penghambat utama dalam implementasi Sirekap, yaitu:

Berikut poin-poin faktor penghambat implementasi Sirekap di PPK Loa Janan Ilir:

1. Kesiapan Teknologi, gangguan server dan ketidaksesuaian perangkat operator membuat unggah data Sirekap sering tertunda.
2. Kompetensi Pelaksana, pelatihan yang mepet hari-H tanpa panduan troubleshooting praktis membuat banyak operator kebingungan saat menghadapi error.
3. Komunikasi & Koordinasi, alur pelaporan berjenjang tanpa helpdesk real-time membuat respons terhadap kendala teknis menjadi lambat.
4. Edukasi Publik, warga kerap keliru mengira data digital sudah final, sementara sosialisasi hanya menasar petugas dan belum menjangkau partai atau tokoh masyarakat.
5. Kepercayaan Sistem, mismatch antara hasil OCR dan hitung manual, ditambah alur aplikasi yang dianggap rumit, menurunkan kepercayaan dan memicu kembalinya metode manual.

### **Penutup**

#### ***Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian di PPK Loa Janan Ilir, implementasi Sirekap telah sesuai dengan PKPU No. 25/2023 dan mampu mempercepat rekapitulasi suara serta meningkatkan keterbukaan informasi, namun efektivitasnya terhambat oleh enam faktor utama: pemahaman prosedur teknis yang belum merata di kalangan petugas, keterbatasan perangkat dan konektivitas internet, alur koordinasi antarorganisasi yang kadang lambat, variasi sikap dan kepercayaan diri operator dalam menggunakan aplikasi, struktur birokrasi hierarkis yang menunda respons teknis, serta kesenjangan literasi digital masyarakat yang menimbulkan kebingungan antara hasil manual dan digital. Untuk menjawab tantangan ini, perlu diperkuat infrastruktur teknologi, pelatihan berjenjang, penyederhanaan mekanisme koordinasi, dan sosialisasi yang lebih masif agar Sirekap dapat berfungsi optimal dan memperoleh kepercayaan publik dalam penyelenggaraan demokrasi digital.

#### ***Saran***

Berikut rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi Sirekap:

1. Pelatihan Berjenjang dan Simulasi Gangguan, sediakan pelatihan teknis intensif sejak jauh hari sebelum hari-H, mencakup simulasi skenario gangguan dan studi kasus nyata.
2. Penguatan Infrastruktur Teknologi, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan penyedia telekomunikasi untuk memastikan konektivitas internet stabil dan perangkat Android kompatibel tersedia di setiap TPS.
3. Platform Koordinasi Terpadu, kembangkan sistem informasi internal yang aman untuk menggantikan komunikasi informal (WhatsApp/Zoom), sehingga koordinasi teknis antarlevel berjalan real-time.
4. Sosialisasi Publik Transparan, jalankan kampanye edukasi menjelaskan alur input, validasi, dan verifikasi data Sirekap, menegaskan bahwa hasil resmi tetap melalui rapat pleno manual.
5. Evaluasi dan Peningkatan Sistem, lakukan audit teknis menyeluruh terhadap server, proses unggah, dan fitur keamanan Sirekap untuk meningkatkan keandalan dan kecepatan.
6. Focus Group Discussion (FGD) Pasca-Pemilu, adakan forum diskusi dengan PPK, PPS, KPPS, dan operator Sirekap untuk mengumpulkan umpan balik lapangan sebagai dasar penyempurnaan berkelanjutan.

#### **Daftar Pustaka**

- Alfariji, M. S. (2024). Kondisi Demokrasi Indonesia Antara Harapan dan Kekhawatiran Pasca Pemilu 2024. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 1(1), 32–40.
- Arora, A., Nandkumar, A., & Telang, R. (2010). Does information security attack frequency increase with vulnerability disclosure? *Information Systems Research*, 21(3), 442–460.
- Asari, E. (2020). E-voting dan e-counting dalam Pilkada: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 145–160.
- Birch, S. (2011). *Electoral malpractice*. Oxford University Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Dye, T. R. (1978). *Understanding public policy* (2nd ed.). Prentice-Hall.
- Freeman, C., & Soete, L. (1997). *The economics of industrial innovation*. MIT Press.
- Gauru, D., et al. (2022). Efektivitas Sirekap dalam Digitalisasi Pemilu. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, (12)2, 224–230.
- Hardiyanti, R., Yusuf, M., & Hanifah, S. (2022). Menjaga Integritas Pemilu Digital: Kesiapan Infrastruktur dan Kompetensi SDM. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 9(3), 179–191.
- Indah, Novitasari. (2021). *Buku Materi Pembelajaran Teori Kebijakan Publik*.

- Inzana, N., Maulana, A., & Sari, P. M. (2024). Inovasi Sirekap dalam meningkatkan partisipasi politik. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1–13.
- Katadata.co.id. (2024). PDIP Temukan KPU Ubah Data Sirekap 753 Kali Usai Rekapitulasi Tuntas.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024b). *Panduan penggunaan Sirekap Pemilu 2024*.
- Kriswibowo, A., Rachman, B., & Arini, R. (2024). Evaluasi Efektivitas Aplikasi SIREKAP dalam Pemilu 2024: Perspektif Teknologi dan Kelembagaan. *Jurnal E-Government Indonesia*, 6(1), 1–15.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pradesa, I. A. (2024). Analisis penggunaan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) dalam menghadapi problematika Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 3(4), 47–57.
- Przeworski, A., Stokes, S. C., & Manin, B. (2000). *Democracy, accountability, and representation*. Cambridge University Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Harper & Brothers.
- Sulasamono, B. S. (2016). Teori implementasi kebijakan. In *A Companion to Cognitive Science* (hlm. 289–298).
- Turkle, S. (2011). *Alone together: Why we expect more from technology and less from each other*. Basic Books.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–478.
- Yusrin, H., & Salpina, E. (2023). Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi SIREKAP di Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Politik dan Teknologi*, 8(2), 66–80.